

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PUTUS SEKOLAH STUDI DI DESA PALANGISENG KABUPATEN SOPPENG

Ahmad Rifai
Pendidikan Sosiologi FIS-UNM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa tentang Pemberdayaan Masyarakat Putus Sekolah serta bagaimana peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengentasan anak putus sekolah di Desa Palangiseng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif yang memberikan gambaran secara faktual mengenai analisa Pemberdayaan Masyarakat Putus Sekolah di Desa Palangiseng Kabupaten Soppeng. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan: Berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, (1) faktor yang menjadi penyebab anak tidak atau putus sekolah adalah: (a) kurangnya minat anak untuk bersekolah, (b) Biaya kebutuhan sekolah yang mahal, (c) Teman sepergaulan anak. (2) Peranan pemerintah dalam memberdayakan anak putus sekolah yang terjadi di Desa Palangiseng yakni: menyediakan fasilitas kepada masyarakat untuk mengakses lahan pertanian, karena sebagian besar masyarakat yang mengalami putus sekolah, mereka memilih berkebun sehingga anak yang mengalami putus sekolah dapat dengan mudah untuk mengakses lahan pertanian mereka, dengan cara membangun jalan tani di setiap dusun. (3) Selain upaya yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat yang mengalami putus sekolah masih ada pula kendala atau permasalahan yang di alami sehingga menghambat pemberdayaan atau pun pencegahan terjadinya anak putus sekolah yakni: (a) Hal ini terjadi karena kurangnya kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat terkait yakni Kepala Desa/Lurah dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengenai data masyarakat miskin, jumlah masyarakat yang mengalami putus sekolah serta tidak meratanya informasi kepada masyarakat tentang pemberian bantuan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Masyarakat Putus Sekolah*

ABSTRACT

The aimed of the research know to identify and analysis on Community Empowerment Dropout and how the role of local government in empowering the community, especially in the reduction of school dropouts in the Palangiseng Village Kecamatan Lilirilau Soppeng District. This is a descriptive qualitative research that gives a factual description of the analysis of Community Empowerment Dropout in the of Palangiseng Village, Soppeng District. Data was collected through observation and interviews. The data were then analysis qualitative.

The results showed: Based on the cases found in the author field, (1) factors that cause children are not or dropped out of school are: (a) lack of interest of the child to attend school, (b) Costs need expensive school, (c) playmate children. (2) The role of the government in empowering children out of school in the village on Palangiseng namely: provide facilities for the public to access agricultural land, because most of the people who dropped out of school, they chose gardening so that children who have dropped out of school can easily access their farmland, by building farm roads in each catchment. (3) In addition to the efforts to empower people who have dropped out of school are still some obstacles or problems experienced thus hindering empowerment or prevention of school dropouts namely: (a) This occurs because of the lack of cooperation between village government and the central government related to the village chief / headman with the Department of Education, Youth and Sports of the data on the poor, the number of people who dropped out of school as well as the unequal distribution of information to the public about the provision of assistance to the community.

Keywords: *Community Empowerment Dropout*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap keperibadian, keluarga, kelompok, dalam berbangsa dan bernegara. Pendidikan menjadi salah satu hal yang menjadi penentu dalam pembangunan suatu bangsa dan negara. Semakin tinggi kualitas pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas yang dimiliki oleh seseorang itu. Kualitas yang dimaksudkan di sini adalah pribadi yang memiliki keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam aspek – aspeknya yaitu intelektual, moral, sosial, spiritual, fisik dan sebagainya. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan inti dari pendidikan yakni meningkatkan keperibadian secara optimal dari setiap individu.

Melihat kenyataan yang ada pada pendidikan Indonesia sekarang dapat dikatakan masih jauh dari cita-cita yang ingin dicapai sebagai tujuan dari pendidikan Indonesia. Dimana pendidikan belum mampu menjangkau seluruh penjuru Indonesia untuk menciptakan kualitas pendidikan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari daerah – daerah yang berada jauh dari pusat pemerintahan masih banyak yang belum terjangkau oleh kualitas pendidikan yang memadai.

Disamping itu pemerintah telah merumuskan dalam Undang – undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diharapkan bersama yaitu: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Pasal 3 UU RI No 20/ 2003)”.

Jadi jelaslah bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja agar anak didik memiliki sikap dan keperibadian yang baik, sehingga penerapan pendidikan harus diselenggarakan sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional. Untuk itu seluruh daerah yang menjadi bagian dari Indonesia berhak mendapat pelayanan pendidikan yang sama, sehingga seluruh penduduk dapat memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan yang dicita – citakan oleh bangsa Indonesia.

Namun melihat kondisi sekarang masih banyak daerah yang terletak jauh dari pusat pemerintahan memiliki sejumlah penduduk yang mengalami putus sekolah. Putus sekolah bukan merupakan salah satu permasalahan pendidikan yang tak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit untuk dipecahkan penyebabnya, tidak hanya karena kondisi ekonomi, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang, ada juga yang disebabkan oleh kekacauan dalam keluarga, dan lain-lain sebagainya. Hal ini juga dialami oleh beberapa masyarakat di Desa Palangiseng Kabupaten Soppeng.

Masyarakat yang mengalami putus sekolah itu biasanya berada pada usia remaja, diusia yang seperti ini anak banyak mengalami perubahan perilaku dan sikap yang cenderung tidak dapat dikendalikan oleh anak tersebut sehingga dapat berdampak pada sikap anak yang selalu ingin bebas dan melakukan apapun sesuai dengan keinginannya, sedangkan jika mereka terikat oleh suatu sekolah yang mereka tempati bersekolah, mereka menganggap tidak bebas karena terikat aturan yang ada pada sekolah tersebut. Untuk itu banyak anak remaja yang melakukan tindakan yang buruk dengan berhenti dari sekolah karena hanya ingin memperoleh kebebasan.

Adanya kondisi putus sekolah, membuat remaja dalam perkembangannya hanya terjadi pada lingkungan sosialnya saja yang lambat laun akan membentuk konsep diri seseorang, seperti pengalaman yang didapat, polah asuh orang tua yang akan membentuk konsep diri seseorang. Kondisi lingkungan dan polah asuh orang tua menjadi petunjuk atau informasi bagi seorang yang mengalami putus sekolah untuk menilai siapa dirinya. Jadi itu semua tergantung pada polah asuh dan kondisi lingkungan disekitarnya. Polah asuh atau lingkungan yang kurang baik seperti melecehkan, menghina, mendapatkan perlakuan yang tidak adil tidak diharagai dan lain sebagainya terhadap seseorang yang putus sekolah sehingga dapat membuat konsep diri yang negatif, karena seseorang yang putus sekolah menilai berdasarkan yang dialami dan didapatkan dari lingkungan sekitarnya.

Melihat kondisi yang terjadi sekarang banyak remaja atau masyarakat yang salah menafsirkan lingkungan yang ada disekitarnya atau bahkan mereka memang berada pada lingkungan yang memberi pengaruh negatif. Untuk itu dalam memberdayakan masyarakat yang mengalami putus sekolah perlu upaya yang lebih keras dari pemerintah agar menciptakan suatu terobosan agar mereka yang mengalami putus sekolah dapat diberdayakan, sehingga mereka dapat terhindar dari perilaku yang mengarah pada perilaku kriminalitas. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja namun juga memberikan pelayanan pendidikan kepada mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup, karena pendidikan yang layak bagi setiap warga Negara bukan hanya melalui pendidikan yang formal saja akan tetapi bisa juga melalui pendidikan non formal dan informal.

Pendidikan non formal ini dapat menjadi pilihan yang tepat bagi seseorang yang mengalami putus sekolah sehingga mereka dapat menambah pengetahuan mereka dan dapat menjadi bekal untuk mendapat pekerjaan. Dalam rangka memberdayakan masyarakat yang mengalami putus sekolah terdapat beberapa macam pendidikan yang termasuk kedalam pendidikan non formal, diantaranya pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk membebrdayakan dan mengembangkan kemampuan masyarakat yang putus sekolah.

Pendidikan luar sekolah menurut Philips H. Coombs (Sudjana, 2001 : 22-230) bahwa: "Pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan yang terorganisir dan sistematis diluar sistem persekolahan yang mapan. Dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya".

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi kasus dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria aparat pemerintah desa 3 orang, orang tua anak putu sekolah 6 orang dan masyarakat putus sekolah anantara usa 10-23 tahun 8 orang serta menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudia diolah dengan cara analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Masyarakat Putus Sekolah di Desa Palangiseng

Pendidikan formal membutuhkan proses belajar mengajar di bangku sekolah dan beberapa jenjang atau tingkat pendidikan mulai dari tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Perguruan Tinggi. Namun dalam proses pendidikan secara formal belum dapat terealisasi secara maksimal disebabkan karena di Desa Palangiseng masih ada masyarakat yang mengalami putus sekolah terutama pada tingkat perguruan tinggi masih ada masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan mereka, dimana penyebab dari putus sekolah ini tentunya sangat beragam sesuai dengan kondisi kehidupan yang dialami oleh masyarakat yang putus sekolah.

2. Faktor Penyebab Putus Sekolah

Kasus anak putus sekolah tentunya tidak akan terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi anak sekolah sehingga tidak dapat menyelesaikan sekolah, wajar saja terjadi karena anak dihadapkan oleh beberapa kendala, baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari luar diri anak yaitu lingkungan. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa kasus mengenai anak putus dan atau tidak sekolah yang terjadi di Desa Palangiseng: Kurangnya Minat Anak untuk Bersekolah, Biaya Kebutuhan Sekolah yang Mahal, Teman Sepergaulan/lingkungan Tempat Tinggal

3. Peranan Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Anak Putus Sekolah di Desa Palangiseng

Terjadinya suatu kondisi putus sekolah pada suatu daerah tertentu merupakan permasalahan yang dialami oleh seluruh aparat pemerintahan serta masyarakat yang berada di daerah tersebut. Kondisi yang sama dialami oleh pemerintah dan masyarakat Desa Palangiseng, terjadinya putus sekolah yang ada di Desa Palangiseng merupakan permasalahan yang dihadapi oleh seluruh masyarakat, sehingga dalam pencegahannya diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara aparat pemerintahan dengan seluruh lapisan masyarakat.

Melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat putus sekolah di Desa Palangiseng yang kebanyakan setelah mengalami putus sekolah mereka banyak memilih untuk pergi merantau atau bekerja menjadi petani yang merupakan pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Palangiseng. Melihat kondisi tersebut dimana anak yang berusia muda memiliki sifat serba instan atau menginginkan semua dilakukan dengan mudah, maka dari itu pemerintah membuat kebijakan dengan membangun jalan-jalan tani di setiap dusun untuk memudahkan masyarakat menjangkau kebun mereka, terutama anak remaja yang putus sekolah sudah memiliki semangat untuk pergi ke kebun dengan menggunakan motor atau sepeda mereka dapat dengan mudah sampai ke kebun mereka.

PENUTUP

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah di Desa Palangiseng antara lain: kurangnya minat anak untuk bersekolah, biaya kebutuhan sekolah yang mahal, dan pengaruh teman pergaulan/lingkungan tempat tinggal. Adapun Peranan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat yang mengalami putus sekolah di Desa Palangiseng adalah sebagai berikut: yaitu menyediakan atau memberikan sarana dan prasarana kepada masyarakat untuk memudahkan mereka mengakses lahan pertanian mereka, karena kebanyakan masyarakat yang mengalami putus sekolah lebih memilih untuk bekerja sebagai petani, jadi dengan menyediakan sarana seperti membuat jalan tani di setiap dusun dapat memudahkan akses masyarakat untuk ke kebun mereka.

2. Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan tegas yang bersifat pemberian sanksi terhadap anak yang putus dan atau tidak sekolah sebagai upaya pengentasan anak putus sekolah, sehingga kedepannya para masyarakat menjadi jera karena tidak mengikuti proses pendidikan formal, slain itu pemerintah diharapkan terus melakukan pendataan mengenai anak putus sekolah di setiap daerah secara merata. Data ini, kemudian dijadikan landasan dalam merumuskan suatu kebijakan yang menjadi pegangan dalam pengentasan anak putus sekolah, pemerintah perlu terus mengadakan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bersekolah hingga ke pelosok pegunungan serta daerah yang terpencil secara berkelanjutan, serta perlunya membangun sistem kerjasama yang terpadu antara pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pengentasan dan pemberdayaan anak putus sekolah secara terprogram dan berkelanjutan seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan semua pihak yang terkait mulai dari pemerintah desa hingga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam memberdayaakn anak putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, Adi. *Pemberdayaan, Partisipasi, Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Humaniora: Bandung.
- Hasbullah. 2010. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Imron, Ali. 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Mawardi. 2007. *Peranan Sosial Capital dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Pengembangan Masyarakat. Vol 3. No 2.
- Sudjana, Nana. 2001. *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru
- Suharto. Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*: Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra . K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*: Bandung: Alfabeta.
- Undang – undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman.Sunyoto. 2006. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Willis, S. Sofyan. 2010 *Remaja dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.